

TUJUAN 3 : Penguatan Fondasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak

Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berdampak. Sasarannya berupa **Nilai Reformasi Birokrasi General** Untuk melihat capaian kinerja tahun 2025 sebagai tahun pertama RPJMD Kota Bandung 2025-2029, dapat dilihat pada 1 (satu) indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.28
**Capaian Kinerja Sasaran
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Berdampak Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2029
		Target	Realisasi	%	Target
1	Nilai Reformasi Birokrasi General	77,00	76,95	99,94	85,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		99,94			

Sasaran **Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berdampak** dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu :

Capaian kinerja indikator “**Nilai Reformasi Birokrasi General**” yaitu dari target tahun 2025 yaitu 77,00 kurang dari target yaitu 76,95 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 99,94%.

Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 85,00 maka capaian kerjanya 90,53%.



Nilai Reformasi Birokrasi General

Tabel 2.29
Target Indikator RB General

No	Indikator Penilaian	2025			Target 2029
		Target	Capaian	%	
1	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	4	4,00	100,00	5
2	Tingkat Maturitas SPIP	3	3,1	103,33	3
3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	4	0	0,00	4
4	Nilai SAKIP	81,94	82,26	100,39	83,42
5	Tingkat Digitalisasi Arsip	78	74,91	96,04	79,2
6	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	4	4	100	5
7	Indeks Kualitas Kebijakan	71,5	88,90	124,34	71,53
8	Indeks Reformasi Hukum	87,45	97,64	111,65	87,49
9	Indeks Pembangunan Statistik	3,04	3,04	100%	3,08
10	Indeks Tata Kelola Pengadaan	83,42	85,01	101,91	92,48
11	Indeks Sistem Merit	364,9	359,50	98,52	381,3
12	Indeks Pelayanan Publik	4,7	4,73	100,64	4,7
13	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	93	82,00	88,17	93
14	Indeks SPBE	4,62	4,66	100,87	4,72
15	Opini BPK	WTP	N/A	N/A	WTP
16	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	85	84,43	99,33	85,4
17	Indeks BerAkhlaq	83,5	82,90	99,28	86,12
18	Survei Penilaian Integritas	70,14	69,17	98,62	70,5
19	Survei Kepuasan Masyarakat	88,28	89,08	100,91	88,28
20	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	3	0	0,00	4

1. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

Capaian indikator “Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi” yaitu dari target tahun 2025 yaitu 4 tercapai sesuai yaitu 4 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%.

Indikator Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi penyesuaian sistem kerja sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi. Indikator ini menilai sejauh mana organisasi perangkat daerah telah mengimplementasikan pola kerja baru berbasis kolaborasi, tim kerja, serta integrasi proses bisnis organisasi.

Penilaian indikator ini mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam kerangka evaluasi reformasi birokrasi. Implementasi sistem kerja telah berada pada fase konsolidasi dan penguatan, yang menunjukkan bahwa penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan struktur organisasi telah berjalan dengan baik.

Capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- Integrasi tim kerja ke dalam mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan,
- Penyelarasan peta proses bisnis perangkat daerah, dan
- Penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman operasional pelaksanaan tugas.

Dengan demikian, implementasi sistem kerja telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas koordinasi organisasi serta percepatan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, indikator Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi telah mencapai target yang ditetapkan. Target kinerja sebesar nilai 4 berhasil direalisasikan sebesar nilai 4, sehingga tingkat capaian mencapai 100 persen dari target tahunan. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi penyesuaian sistem kerja sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target akhir dalam dokumen RPJMD tahun 2029 sebesar nilai 5, capaian tahun 2025 telah mencapai 80 persen dari target akhir. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem kerja telah memasuki fase konsolidasi dan penguatan, di mana mekanisme kerja berbasis kolaborasi dan tim kerja mulai terinternalisasi dalam tata kelola organisasi perangkat daerah. Implementasi tersebut didukung oleh integrasi tim kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, penyelarasan peta proses bisnis perangkat daerah, serta penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman operasional pelaksanaan tugas.

Rekomendasi Perencanaan

Dalam rangka menjaga keberlanjutan pencapaian indikator ini hingga mencapai target akhir RPJMD, perlu dilakukan penguatan kebijakan perencanaan melalui penyelarasan sistem kerja dengan peta proses bisnis organisasi, serta penguatan perencanaan program dan kegiatan berbasis tim kerja yang kolaboratif dan lintas fungsi.

Rekomendasi Pengukuran

Pengukuran indikator perlu terus dilakukan secara sistematis melalui evaluasi implementasi sistem kerja pada perangkat daerah, termasuk pengukuran terhadap efektivitas koordinasi tim kerja, keselarasan peta proses bisnis dengan tugas dan fungsi organisasi, serta konsistensi penerapan SOP dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain melalui penguatan pembinaan terhadap perangkat daerah dalam penerapan sistem kerja berbasis tim kerja, peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan proses bisnis organisasi, serta